

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SMPIT AT-TAQWA SURABAYA

Jihan Tsaabiatah Farhah, Mufarrihul Hazin

¹ Universitas Negeri Surabaya; jihan.21054@mhs.unesa.ac.id

² Universitas Negeri Surabaya; mufarrihulhazin@unesa.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan;
Kurikulum Merdeka;
Komunikasi;
Sikap Pelaksana;
Sumber Daya.

Article history:

Diterima 2025-07-05
Direvisi 2025-07-06
Diterima 2025-07-08

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SMPIT At-Taqwa Surabaya ditinjau dari aspek komunikasi, sikap pelaksana, dan sumber daya sekolah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya pemahaman dan penerapan kebijakan kurikulum secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar pelaksana dilakukan intensif melalui koordinasi internal dan pelatihan. Guru dan tenaga kependidikan menunjukkan sikap positif dan mampu beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Sumber daya sekolah dinilai cukup memadai, meskipun masih ada tantangan dalam memahami dan menerapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka berjalan sistematis dan adaptif, menggabungkan kurikulum nasional dan khas sekolah. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik kurikulum di sekolah.

Penulis yang Sesuai:

Jihan Tsaabitah Farhah

Universitas Negeri Surabaya; jihan.21054@mhs.unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pendidikan dituntut untuk tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter, kompetensi abad ke-21, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan dunia nyata (Dewi Fusvita, 2023). Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (*life-long education*) yang menekankan pentingnya pembelajaran sebagai proses berkelanjutan untuk pengembangan diri dan masyarakat. Di Indonesia, pendidikan memiliki arah yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan adalah kurikulum, yang berfungsi sebagai kerangka kerja utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Kurikulum tidak hanya mengatur materi yang harus diajarkan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan pendidikan nasional dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya (Syam, 2017). Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, kontekstual, dan mendorong penguatan karakter melalui *Profil Pelajar Pancasila* (Kemendikbudristek, 2022).

Kurikulum Merdeka muncul sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu padat, kurang adaptif, dan menekankan pada aspek kognitif secara berlebihan. Dalam Kurikulum Merdeka, peserta didik diberi ruang untuk belajar sesuai minat, bakat, dan tahap perkembangan mereka. Salah satu fitur utama dalam kurikulum ini adalah pelaksanaan *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebhinekaan, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berakhlak mulia melalui kegiatan berbasis proyek (Ramadhan, 2024). Namun, pelaksanaan kurikulum ini di lapangan tidak lepas dari tantangan, seperti kesiapan guru, pemahaman terhadap struktur baru, keterbatasan sumber daya, serta dinamika koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan adalah bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan dijalankan oleh pelaksana di tingkat sekolah. George C. Edwards III dalam model implementasi kebijakan publik menyebutkan empat variabel utama yang memengaruhi efektivitas implementasi: komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pendidikan, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan berperan penting sebagai aktor pelaksana kebijakan yang bertugas menerjemahkan arah kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada sejauh mana pelaksana memiliki pemahaman, sikap positif, dan dukungan sumber daya yang memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut.

SMPIT At-Taqwa Surabaya merupakan salah satu sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan pendekatan integratif. Sekolah ini tidak hanya mengadopsi kurikulum nasional, tetapi juga menggabungkannya dengan kurikulum khas seperti Kurikulum Vista (Visi Semester), Kurikulum Al-Qur'an, dan Kurikulum Bahasa Inggris. Pendekatan integratif ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dapat diadaptasi secara kontekstual sesuai dengan karakteristik, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan. Dalam implementasinya, sekolah ini juga mengembangkan sistem komunikasi internal yang aktif, membangun semangat kolaboratif antar guru, serta memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan P5. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SMPIT At-Taqwa Surabaya, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) komunikasi pelaksana, (2) sikap pelaksana, dan (3) sumber daya sekolah. Ketiga aspek ini dipilih karena dianggap sebagai elemen fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk informasi empiris tentang praktik implementasi Kurikulum Merdeka, serta menjadi rujukan bagi

pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan di sekolah lain dalam menyusun strategi pelaksanaan kurikulum secara efektif dan kontekstual.

Meskipun Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan, tidak semua sekolah dapat serta-merta mengimplementasikannya secara optimal. Banyak sekolah yang mengalami kebingungan dalam memahami struktur pembelajaran berbasis fase, tantangan dalam mengatur asesmen formatif dan sumatif, serta keterbatasan dalam menjalankan proyek lintas disiplin seperti P5. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kurikulumnya saja, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan internal sekolah, termasuk kualitas komunikasi antar pemangku kebijakan, sikap guru sebagai pelaksana, dan ketersediaan sarana pendukung. Studi oleh Fenty Setiawati (2022) menegaskan bahwa hambatan implementasi Kurikulum Merdeka banyak terjadi karena kurangnya pemahaman teknis guru, lemahnya pelatihan implementatif, dan perbedaan konteks antar satuan pendidikan. Oleh karena itu, kajian berbasis praktik di sekolah menjadi penting untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan ini dijalankan dan dimodifikasi sesuai dengan realitas sekolah masing-masing.

Penelitian di SMPIT At-Taqwa Surabaya menjadi penting karena sekolah ini telah mengembangkan pendekatan implementasi kurikulum yang tidak hanya menyesuaikan dengan panduan dari pemerintah pusat, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan visi pendidikan global. Hal ini menjadikan sekolah sebagai representasi dari model pendidikan Islam modern yang mampu berinovasi dalam pelaksanaan kebijakan nasional. Selain itu, sekolah ini juga telah mengembangkan budaya kolaboratif antar guru dan membangun sistem komunikasi internal yang mendukung pembelajaran lintas disiplin, yang menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan proyek P5. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan dalam konteks deskriptif, tetapi juga berfungsi sebagai studi kasus inspiratif yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan implementatif Kurikulum Merdeka di sekolah lain, khususnya di lembaga pendidikan berbasis Islam. Melalui pemahaman terhadap bagaimana komunikasi, sikap pelaksana, dan sumber daya dikelola dalam konteks nyata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang manajemen implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SMPIT At-Taqwa Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan memahami makna yang terkandung di balik tindakan, kebijakan, dan interaksi yang berlangsung di lingkungan pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut sangat relevan untuk mengkaji dinamika pelaksanaan kebijakan pendidikan yang bersifat kompleks dan kontekstual, terutama ketika berkaitan dengan respon pelaksana kebijakan seperti guru dan kepala sekolah terhadap transformasi kurikulum nasional. Fokus utama penelitian ini meliputi tiga aspek penting dalam implementasi kebijakan menurut teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana, dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah.

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Pemilihan subjek dilakukan

dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam penerapan kurikulum di sekolah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam, karena informan dipilih secara selektif berdasarkan keterkaitan mereka dengan fokus penelitian. Informan utama meliputi kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan internal, wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai pelaksana teknis, guru penggerak, serta guru yang terlibat dalam pengembangan modul ajar dan pelaksanaan proyek P5. Melalui pemilihan informan yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan kaya akan makna kontekstual.

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap pertama adalah observasi langsung ke sekolah untuk memperoleh pemahaman awal mengenai lingkungan fisik, budaya kerja, serta dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. Observasi ini bersifat partisipatif, di mana peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga terlibat dalam beberapa kegiatan sekolah guna memperdalam pemahaman terhadap praktik yang berlangsung. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur, yang berarti peneliti memiliki pedoman pertanyaan utama namun tetap memberikan ruang untuk eksplorasi isu yang berkembang selama percakapan berlangsung. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat menangkap perspektif, sikap, dan strategi pelaksana kebijakan dalam menjalankan Kurikulum Merdeka.

Selain observasi dan wawancara, teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh. Dokumentasi yang dikumpulkan mencakup surat edaran kebijakan internal sekolah, jadwal pelaksanaan kegiatan, dokumen asesmen pembelajaran, notulen rapat kurikulum, dan laporan kegiatan P5. Dokumen-dokumen ini membantu peneliti memahami struktur kebijakan yang diadopsi oleh sekolah dan sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan panduan pusat. Dengan demikian, triangulasi data dapat dilakukan secara optimal melalui kombinasi teknik pengumpulan data yang beragam, yang memperkuat keabsahan temuan penelitian.

Dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, peneliti menggunakan berbagai instrumen yang dirancang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Instrumen tersebut terdiri atas pedoman observasi, pedoman wawancara, dan format analisis dokumentasi. Seluruh instrumen disusun berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari teori implementasi kebijakan publik dan karakteristik Kurikulum Merdeka. Peneliti juga bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang berperan aktif dalam proses pencatatan, interpretasi, dan analisis data. Untuk menjaga objektivitas, peneliti melakukan refleksi diri secara berkala serta berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan pakar bidang kurikulum.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi relevan sesuai fokus penelitian dan mengelompokkan data ke dalam kategori tematik. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan informan untuk memperjelas temuan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan pola, tema, dan keterkaitan antar data lapangan yang ditemukan secara berulang. Proses ini berlangsung secara siklikal, artinya peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya jika ditemukan data baru yang perlu ditinjau ulang. Untuk menjamin keabsahan dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan yang berbeda untuk melihat konsistensi data. Sementara triangulasi teknik

dilakukan dengan memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar setiap temuan dapat diperkuat dari berbagai sudut pandang. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan yang bersangkutan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan maksud dan pengalaman mereka.

Secara keseluruhan, pendekatan dan prosedur penelitian ini dirancang untuk menggambarkan realitas implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di lingkungan sekolah secara menyeluruh dan mendalam. Kombinasi antara observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap dinamika kebijakan di tingkat pelaksana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori implementasi kebijakan pendidikan serta menjadi rujukan dalam perumusan strategi penerapan kurikulum di berbagai konteks satuan pendidikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SMPIT At-Taqwa Surabaya, yang ditinjau dari tiga aspek utama: komunikasi pelaksana, sikap pelaksana, dan sumber daya yang tersedia. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SMPIT At-Taqwa Surabaya, peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap berbagai aktivitas dan kebijakan sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, Van mter van horn, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dengan mengacu pada tiga fokus utama, yaitu aspek komunikasi pelaksana, sikap pelaksana, dan sumber daya yang tersedia di sekolah. Penyajian hasil penelitian berikut memberikan gambaran konkret mengenai praktik implementasi kebijakan di lapangan, sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1 Hasil Penellitian

a. Komunikasi Pelaksana

Komunikasi merupakan kunci utama dalam menyampaikan arah kebijakan dari level pimpinan ke pelaksana teknis di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan tim kurikulum, komunikasi mengenai Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap dan berulang sejak awal tahun ajaran. Briefing pagi dan rapat mingguan menjadi wadah penyampaian informasi dan penyamaan persepsi antar guru. Selain itu, penggunaan media komunikasi seperti grup WhatsApp guru, Google Classroom, dan dokumen panduan di Google Drive menjadi solusi praktis dalam menjangkau seluruh pelaksana kebijakan. Observasi menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan pembelajaran, guru mengacu pada hasil koordinasi yang sebelumnya telah dibahas bersama dalam rapat.

Komunikasi juga bersifat dua arah; guru diberi ruang untuk menyampaikan masukan, kendala, serta ide dalam pelaksanaan kebijakan, baik melalui forum formal maupun obrolan informal. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi di SMPIT At-Taqwa memenuhi indikator kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), keterbukaan (*openness*), dan kesinambungan (*continuity*). Namun, kendala masih ditemukan terutama dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), di mana komunikasi antartim pelaksana belum sepenuhnya merata, terutama dalam perencanaan kegiatan lintas kelas. Meski begitu, upaya perbaikan terus dilakukan melalui monitoring dan refleksi kegiatan oleh koordinator kurikulum.

b. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana, khususnya guru dan tenaga kependidikan, menjadi aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka. Berdasarkan data

wawancara, sebagian besar guru menyatakan menerima kebijakan ini dengan sikap terbuka. Mereka menyadari bahwa kurikulum ini memberi ruang lebih luas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Banyak guru merasa lebih fleksibel dalam memilih materi ajar, metode pembelajaran, dan strategi asesmen, terutama karena adanya kebebasan dalam menyusun modul ajar mandiri.

Guru-guru juga menunjukkan antusiasme dalam mengikuti pelatihan internal dan eksternal, baik yang difasilitasi oleh sekolah maupun lembaga luar seperti Universitas Negeri Surabaya. Peneliti mencatat adanya semangat kolektif guru dalam menyusun modul, mengembangkan proyek pembelajaran, dan berbagi praktik baik melalui forum diskusi antar jenjang. Meskipun pada awalnya terdapat kebingungan terkait penerapan format asesmen dan struktur pembelajaran yang berbasis fase alih-alih kelas, kebingungan ini secara bertahap dapat diatasi melalui pendampingan oleh tim kurikulum dan guru penggerak. Hasil observasi juga memperlihatkan adanya inisiatif guru untuk merancang kegiatan P5 yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, meskipun masih diperlukan pendampingan lebih lanjut.

Dalam konteks pelaksanaan nilai-nilai kebijakan Kurikulum Merdeka seperti kemandirian belajar, gotong royong, dan berpikir kritis, guru tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi berperan aktif sebagai inisiator perubahan. Beberapa guru bahkan memodifikasi proyek P5 agar lebih sesuai dengan konteks lokal dan visi sekolah. Sikap adaptif ini mencerminkan tingginya disposisi pelaksana terhadap perubahan kebijakan dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi di sekolah ini.

c. Sumber Daya Sekolah

Sumber daya yang dimiliki oleh SMPIT At-Taqwa Surabaya mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, serta perangkat pembelajaran digital. Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi, sekolah telah menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka seperti LCD proyektor di setiap kelas, laboratorium komputer, perpustakaan digital, dan ruang kreatif untuk kegiatan proyek. Sarana ini digunakan secara aktif dalam pembelajaran, khususnya saat siswa mengerjakan proyek berbasis tema atau kolaboratif dalam kegiatan P5.

Dari sisi SDM, sekolah memiliki tim kurikulum yang terdiri dari guru senior, guru penggerak, dan koordinator jenjang. Tim ini bertugas menyusun kalender pelaksanaan kurikulum, menyusun jadwal pelatihan internal, serta mengevaluasi implementasi setiap periode. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru juga memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar sebagai sumber referensi modul ajar, asesmen diagnostik, dan pelatihan mandiri. Selain itu, sekolah juga membuat buku panduan khusus yang menggabungkan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum Vista dan Kurikulum Qur'an sebagai bagian dari kurikulum khas sekolah. Ini menjadi strategi integratif untuk menyeimbangkan antara kurikulum nasional dan visi keislaman sekolah.

Meskipun secara umum sumber daya di sekolah memadai, tantangan masih ditemukan dalam pelaksanaan proyek P5. Beberapa guru mengungkapkan keterbatasan waktu untuk pelaksanaan proyek, serta keterbatasan dalam mendampingi siswa secara intensif selama proyek berjalan. Selain itu, belum semua guru memiliki kemampuan dokumentasi kegiatan P5 yang sesuai dengan panduan teknis yang ditetapkan. Oleh karena itu, tim kurikulum berencana melakukan pendampingan teknis lanjutan dan menyederhanakan panduan dokumentasi agar lebih mudah diimplementasikan oleh seluruh guru.

Salah satu keunikan implementasi Kurikulum Merdeka di SMPIT At-Taqwa Surabaya adalah integrasinya dengan kurikulum khas sekolah seperti Kurikulum Vista, Kurikulum Al-Qur'an, dan Kurikulum Bahasa Inggris. Integrasi ini tidak mengurangi esensi Kurikulum Merdeka, namun memperkuat karakteristik sekolah yang berbasis Islam dan berpandangan global. Dalam Kurikulum Vista, misalnya, nilai-nilai akhlak karimah dan kesadaran global diperkenalkan melalui kegiatan tematik dan proyek sosial. Sedangkan Kurikulum Al-Qur'an menargetkan lulusan memiliki hafalan minimal 3 juz dan pemahaman tafsir dasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru, integrasi ini memperkaya pelaksanaan P5 karena siswa terbiasa dengan kegiatan proyek dan pembiasaan karakter. Misalnya, kegiatan P5 bertema gotong royong dikolaborasikan dengan program bakti sosial yang sudah rutin dilakukan sekolah. Selain itu, proyek-proyek siswa sering dikaitkan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan pembelajaran bahasa Inggris, sehingga mendukung tujuan pembentukan profil pelajar Pancasila yang utuh. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan masing-masing.

3.2 Pembahasan

1. Komunikasi Pelaksana

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMPIT At-Taqwa Surabaya tidak terlepas dari pentingnya komunikasi yang efektif antara seluruh pelaksana, termasuk kepala sekolah, waka kurikulum, guru, serta tenaga kependidikan. Komunikasi ini menjadi landasan utama dalam memahami, merancang, serta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan. Komunikasi yang baik dalam lingkungan sekolah dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja, sehingga kebijakan pendidikan dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Di SMPIT At-Taqwa Surabaya, komunikasi pelaksana dilakukan melalui berbagai forum seperti rapat koordinasi rutin, diskusi reflektif antar guru, serta pemanfaatan platform digital untuk berbagi informasi. Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, memastikan pemahaman yang seragam, serta memberikan arahan kepada guru dan tenaga kependidikan. Menurut (Wahjosumidjo, 2021) kepemimpinan kepala sekolah yang komunikatif dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memudahkan adaptasi terhadap kebijakan baru.

Selain komunikasi internal, SMPIT At-Taqwa juga menjalin komunikasi eksternal dengan pihak yayasan, dinas pendidikan, serta lembaga pelatihan seperti UNESA. Komunikasi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang Kurikulum Merdeka serta mendapatkan bimbingan dalam penerapannya. Komunikasi yang baik antara sekolah dan pemangku kepentingan dapat memperkuat implementasi kebijakan dan memastikan bahwa setiap pihak memahami perannya dalam perubahan sistem pendidikan. Meskipun komunikasi di SMPIT At-Taqwa berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan, salah satunya adalah perbedaan pemahaman guru dalam menerapkan prinsip Kurikulum Merdeka. Beberapa guru masih merasa kesulitan dalam menyusun perangkat ajar yang sesuai dengan konsep merdeka belajar, sehingga perlu adanya bimbingan dan komunikasi yang lebih intensif. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, komunikasi harus bersifat dua arah agar setiap pelaksana dapat memahami dan menyampaikan kendala yang mereka hadapi (Sohiron, 2015).

Para guru di SMPIT At-Taqwa Surabaya mengungkapkan bahwa struktur koordinasi yang baik antara kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, dan koordinator jenjang sangat mendukung kelancaran implementasi Kurikulum Merdeka. Koordinasi yang terorganisir ini memungkinkan semua pelaksana untuk memiliki pemahaman yang seragam mengenai tujuan dan mekanisme kurikulum, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hargreaves & Fullan (2012), yang menekankan bahwa kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang terstruktur di dalam sekolah dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

Namun, meskipun komunikasi antar pelaksana berjalan efektif, siswa mengungkapkan adanya kendala dalam komunikasi di tingkat kelompok, terutama saat mengerjakan proyek P5. Beberapa siswa merasa bahwa informasi yang mereka terima terkadang kurang jelas, sehingga mereka harus mencari penjelasan tambahan dari guru atau teman. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun ada sistem komunikasi yang baik di antara guru, tantangan tetap ada di tingkat siswa, di mana mereka mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Hal ini sejalan dengan temuan oleh (Vygotsky, 1978) yang menyatakan bahwa interaksi sosial dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam konteks kolaborasi. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memperhatikan aspek komunikasi di antara siswa, terutama dalam konteks proyek berbasis kelompok, agar mereka dapat berkolaborasi dengan lebih baik dan memahami tugas yang diberikan dengan jelas.

Selain itu, keterbatasan dalam penggunaan teknologi juga menjadi tantangan dalam komunikasi, terutama bagi guru yang kurang terbiasa menggunakan platform digital. SMPIT At-Taqwa berupaya mengatasi kendala ini dengan mengadakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan literasi digital guru dan tenaga kependidikan. Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi pendidikan harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia agar berjalan efektif (Nasir & Sutiah, 2025). Strategi komunikasi yang diterapkan di SMPIT At-Taqwa mencakup pembentukan tim khusus yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, memberikan pelatihan kepada guru, serta menyampaikan informasi secara sistematis. Dengan adanya tim ini, setiap guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait implementasi kurikulum, serta memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi. Jadi keberhasilan suatu kebijakan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana komunikasi dan koordinasi antar pelaksana berjalan secara sinergis.

Selain komunikasi formal melalui rapat dan pelatihan, SMPIT At-Taqwa juga menerapkan komunikasi informal sebagai bagian dari strategi penerapan kebijakan. Guru dan tenaga kependidikan didorong untuk saling berbagi pengalaman serta mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dalam forum diskusi yang lebih santai. Menurut (Lestari et al., 2023) komunikasi informal dalam dunia pendidikan dapat memperkuat hubungan kerja sama serta menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan baru. Komunikasi yang baik dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMPIT At-Taqwa tidak hanya membantu dalam penyampaian informasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih terbuka dan kolaboratif. Dengan adanya komunikasi yang lancar, setiap pelaksana dapat memahami kebijakan dengan lebih jelas, mengurangi kesalahpahaman, serta meningkatkan efektivitas dalam penerapan kurikulum. Komunikasi yang efektif dalam organisasi pendidikan merupakan kunci keberhasilan dalam menerapkan perubahan kebijakan secara optimal. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, komunikasi pelaksana di SMPIT At-Taqwa terus mengalami perbaikan untuk mendukung suksesnya implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka. Meskipun masih terdapat tantangan, sekolah terus berupaya mengoptimalkan komunikasi baik secara internal maupun eksternal agar seluruh pelaksana dapat bekerja secara sinergis.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi menjadi elemen fundamental dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SMPIT At-Taqwa Surabaya. Komunikasi yang dilakukan secara formal maupun informal, internal maupun eksternal, telah membentuk sistem koordinasi yang solid antara kepala sekolah, waka kurikulum,

guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Meski masih terdapat tantangan seperti perbedaan pemahaman dan keterbatasan teknologi, strategi komunikasi yang diterapkan terbukti mampu menjembatani kebutuhan dan hambatan pelaksanaan kurikulum. Komunikasi yang terbuka, dua arah, dan kolaboratif memungkinkan pelaksana kebijakan untuk saling berbagi, belajar, dan beradaptasi. Dengan terus mengoptimalkan praktik komunikasi ini, SMPIT At-Taqwa berpotensi menjadi contoh sekolah yang sukses dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif dan berkelanjutan.

2. Sikap Pelaksana

Sikap dan persepsi guru merupakan komponen penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka. Di SMPIT At-Taqwa Surabaya, guru-guru menunjukkan sikap yang positif terhadap kebijakan kurikulum ini karena mereka merasa diberi keleluasaan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Guru tidak lagi sekadar berperan sebagai penyampai materi, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar.

Hal ini sesuai dengan konsep *student-centered learning* yang menjadi inti dari Kurikulum Merdeka. Sebagian besar guru di SMPIT At-Taqwa Surabaya juga menyampaikan bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka memberi tantangan baru yang mendorong mereka untuk lebih inovatif dalam merancang kegiatan pembelajaran. Mereka merasa ditantang untuk menyusun bahan ajar, seperti *handbook* dan modul ajar, yang relevan dan kontekstual. Perubahan ini awalnya memunculkan kebingungan, terutama dalam hal penyesuaian penilaian formatif dan summatif, namun dengan adanya pelatihan dan diskusi rutin, persepsi guru semakin positif seiring waktu. Guru juga mengapresiasi fleksibilitas dalam merancang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), meskipun mereka mengakui bahwa perencanaan proyek tersebut memerlukan kerja sama dan kreativitas yang tinggi.

Sikap dan persepsi guru di SMPIT At-Taqwa Surabaya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan adanya dukungan dari manajemen sekolah, guru merasa lebih percaya diri untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Koordinasi yang baik antara kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, dan koordinator jenjang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dan komunikasi yang terstruktur dapat meningkatkan motivasi dan komitmen guru terhadap kebijakan pendidikan yang baru (Pratikno et al., 2022).

Meskipun ada kendala seperti perbedaan kesiapan dan pemahaman antar guru, mereka tetap menunjukkan semangat tinggi untuk belajar dan beradaptasi. Menurut penelitian oleh (Umar et al., 2024), guru yang memiliki persepsi positif terhadap kurikulum cenderung memiliki motivasi tinggi dalam pelaksanaannya, serta mampu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada guru yang merasa khawatir terhadap ketidaksesuaian antara penilaian Kurikulum Merdeka (yang menekankan pada aspek non-tes) dan tuntutan sistem pendidikan lanjut seperti seleksi masuk SMA yang masih berbasis angka. Kekhawatiran ini memengaruhi persepsi guru terhadap kesinambungan sistem pendidikan. Implementasi Kurikulum Merdeka di SMPIT At-Taqwa tidak hanya bergantung pada kesiapan materi dan sistem, tetapi juga sangat ditentukan oleh sikap dan persepsi guru terhadap kebijakan tersebut.

Sikap positif para guru yang merasakan keleluasaan dalam mengembangkan metode pembelajaran sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Febryanti (2025), yang menyatakan bahwa guru yang diberi kebebasan dalam merancang pembelajaran cenderung lebih termotivasi dan kreatif dalam menerapkan kurikulum baru. Tidak hanya sekadar fasilitator, peran guru sebagai motivator dan pengarah aktif di kelas semakin ditekankan dalam Kurikulum Merdeka, sehingga guru perlu memiliki kepercayaan diri dan dukungan yang cukup agar dapat melaksanakan peran tersebut secara optimal.

Meskipun demikian, ketidaksesuaian antara sistem penilaian Kurikulum Merdeka yang berbasis non-tes dengan sistem seleksi jenjang pendidikan selanjutnya masih menjadi kekhawatiran bagi sebagian guru. Kekhawatiran semacam ini dapat memengaruhi persepsi guru terhadap keberlangsungan dan efektivitas kurikulum baru jika tidak disikapi dengan sinergi kebijakan dari berbagai pihak (Rahmawati et al., 2024). Oleh karena itu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan evaluasi antara jenjang pendidikan sangat diperlukan agar guru tidak merasa terbebani dengan ketidakseimbangan tersebut, dan dapat fokus meningkatkan kualitas pembelajaran.

Diskusi rutin yang dilakukan secara berkelanjutan juga sangat membantu guru dalam mengadaptasi kurikulum baru ini. Program pelatihan profesional yang berkesinambungan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan sikap positif dan pemahaman guru dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Selain itu, lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif juga memperkuat semangat guru dalam berinovasi dan melakukan refleksi atas praktik pembelajaran yang dilaksanakan (K. Y. Nugroho et al., 2024).

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan sekolah untuk memastikan adanya sinkronisasi antara kebijakan Kurikulum Merdeka dan kebijakan evaluasi pendidikan pada jenjang selanjutnya. Secara keseluruhan, sikap dan persepsi guru di SMPIT At-Taqwa menunjukkan kesiapan dan keterbukaan terhadap perubahan, didukung oleh pelatihan yang berkelanjutan dan lingkungan kerja yang kolaboratif. Peningkatan profesionalisme guru melalui pelatihan, refleksi pembelajaran, dan kolaborasi antarguru sangat berperan dalam memperkuat implementasi kurikulum ini. Menurut (Suprihatiningrum, 2017) penguatan kompetensi dan pemahaman guru terhadap perubahan kurikulum harus menjadi fokus dalam strategi implementasi agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

3. Sumber Daya Sekolah

SMPIT At-Taqwa Surabaya memiliki sumber daya yang cukup kuat dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Dari sisi sumber daya manusia, sekolah ini didukung oleh guru-guru yang telah mengikuti berbagai pelatihan, baik dari yayasan, dinas pendidikan, maupun lembaga mitra seperti Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Pelatihan-pelatihan tersebut meliputi materi pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan asesmen autentik, hingga perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Beberapa guru juga telah lolos sebagai peserta program guru penggerak, yang menunjukkan bahwa sekolah ini telah mempersiapkan SDM yang kompeten dan siap menjadi agen perubahan. Keaktifan guru dalam mengikuti pelatihan dan evaluasi secara rutin mencerminkan semangat profesionalisme dan kesiapan mereka dalam menghadapi kebijakan kurikulum baru. Hal ini menekankan pentingnya peran guru profesional dalam mendukung efektivitas implementasi kurikulum.

Dari segi sarana dan prasarana, SMPIT At-Taqwa Surabaya telah dilengkapi dengan fasilitas modern yang menunjang pembelajaran aktif dan digital. Setiap ruang kelas telah dilengkapi dengan LCD proyektor dan sound system untuk mendukung pembelajaran berbasis media. Sekolah juga memiliki laboratorium komputer yang dimanfaatkan untuk pembelajaran teknologi dan pelaksanaan asesmen digital. Dalam mendukung pelaksanaan proyek P5, sekolah menyediakan berbagai alat bantu seperti bahan praktik kewirausahaan dan alat eksperimen sederhana untuk pelajaran IPA. Fasilitas-fasilitas ini menunjukkan bahwa sekolah siap secara teknis untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan berbasis aktivitas. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu indikator utama kesiapan institusi pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum secara optimal (Yatimah et al., 2020).

Hal ini menjadikan bahan ajar di SMPIT At-Taqwa Surabaya juga menjadi salah satu bentuk inovasi sumber daya yang menonjol. Para guru secara mandiri dan kolaboratif menyusun *handbook* atau modul ajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan visi misi sekolah. *Handbook* ini tidak berasal dari penerbit umum, melainkan hasil adaptasi materi ajar berbasis kebutuhan dan konteks sekolah, termasuk penguatan nilai-nilai keislaman. Penyusunan *handbook* juga didukung oleh referensi dari Platform Merdeka Mengajar (PMM), yang digunakan guru untuk mendapatkan ide modul ajar dan video pelatihan mandiri. Penyusunan bahan ajar secara mandiri membuat guru lebih memahami struktur materi dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik secara nyata (Garay Abad & Hattie, 2025).

Dalam mendukung sumber daya guru di sekolah, SMPIT At-Taqwa Surabaya juga mendapatkan dukungan dari yayasan dalam bentuk fasilitas pelatihan internal dan pendampingan berkelanjutan. Sekolah memiliki kebijakan internal untuk melakukan evaluasi secara rutin terhadap efektivitas program pembelajaran, termasuk monitoring pelaksanaan proyek P5 dan asesmen formatif. Kebijakan ini menjadi wujud komitmen manajemen sekolah dalam menjaga mutu pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh.

SMPIT At-Taqwa Surabaya juga memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari sumber daya dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Integrasi platform digital untuk pengelolaan materi ajar, tugas, dan asesmen memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan efisien. Penerapan teknologi pendidikan digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mempermudah adaptasi pembelajaran berbasis proyek, yang sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka (Bayu Kusumo et al., 2024). Dengan mengoptimalkan teknologi, SMPIT At-Taqwa memperluas akses pembelajaran dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan era digital.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai institusi, seperti universitas dan lembaga pelatihan, menjadi salah satu sumber daya penting yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan eksternal ini memberikan peluang bagi guru untuk mengikuti program pengembangan profesional dan sekaligus memperkaya pengalaman belajar siswa melalui kegiatan proyek dan ekstrakurikuler. Kerjasama antara sekolah dan pihak eksternal dapat memperkuat kapasitas SDM serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perubahan kurikulum (Syaodih et al., 2022).

Evaluasi berkelanjutan dan umpan balik dari semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan orang tua, juga menjadi pondasi dalam pengembangan sumber daya di SMPIT At-Taqwa. Sistem evaluasi ini membantu mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kurikulum, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan secara tepat

waktu. Pentingnya evaluasi dan feedback dalam meningkatkan efektivitas implementasi pendidikan dan pencapaian hasil belajar siswa secara optimal (Zaky, 2023).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa SMPIT At-Taqwa Surabaya telah memiliki kesiapan sumber daya yang cukup baik mulai dari guru hingga fasilitas dalam menjalankan Kurikulum Merdeka. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang memadai, bahan ajar yang adaptif, serta pelatihan dari pihak sekolah, pelaksanaan kebijakan kurikulum berjalan dengan lancar dan terarah. Meskipun demikian, pengembangan sumber daya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar sekolah mampu beradaptasi dengan dinamika pendidikan di masa mendatang dan mampu menjaga relevansi proses pembelajaran. Dengan sumber daya yang kuat dan strategi pengembangan yang tepat, sekolah ini dapat menjadi model implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka yang inspiratif.

Meski demikian, kendala masih ditemukan pada pelaksanaan proyek P5, terutama terkait alokasi waktu, pendampingan siswa, dan konsistensi dokumentasi kegiatan. Tantangan ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya harus diikuti dengan manajemen dan evaluasi yang berkelanjutan agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal.

Aspek Implementasi	Teori Implementasi (Edwards III dan Van meter van horn)	Temuan Penelitian di SMPIT At-Taqwa Surabaya
Komunikasi	Kejelasan, konsistensi, keterbukaan, dan kesinambungan komunikasi dibutuhkan agar kebijakan dipahami.	Komunikasi dilakukan secara terstruktur melalui briefing, rapat, dan grup WhatsApp. Ada kejelasan dan keterbukaan, namun koordinasi P5 masih perlu ditingkatkan.
Sikap Pelaksana	Sikap positif pelaksana mendukung efektivitas implementasi kebijakan.	Guru menunjukkan sikap terbuka dan antusias terhadap Kurikulum Merdeka. Keterlibatan aktif dalam pelatihan dan pengembangan modul ajar.
Sumber Daya	Ketersediaan SDM, sarana, dan informasi mendukung keberhasilan implementasi.	Sekolah memiliki sarana lengkap dan guru terlatih. Namun, pendampingan pada pelaksanaan proyek P5 masih terbatas.

Temuan yang konsisten ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas konteks implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka dalam lingkungan sekolah berbasis Islam yang menggabungkan nilai-nilai religius dan kurikulum nasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan pendidikan di Indonesia dengan menunjukkan bahwa fleksibilitas kebijakan harus diimbangi dengan pendekatan kontekstual yang berbasis kebutuhan sekolah dan karakteristik siswa. Sekolah

dengan visi keislaman dan wawasan global seperti SMPIT At-Taqwa mampu menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai peluang untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih holistik, bukan sebagai beban administratif. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan kebijakan nasional tidak hanya ditentukan oleh struktur kebijakan, tetapi juga oleh kreativitas dan adaptasi lokal di tingkat sekolah.

Implikasi dari temuan ini mencakup perlunya kebijakan pendidikan nasional memberi ruang lebih besar bagi sekolah untuk melakukan penyesuaian dan inovasi berbasis karakteristik masing-masing. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pelatihan dan evaluasi berkala agar guru tidak hanya memahami struktur kurikulum secara administratif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai pedagogis yang mendasarinya. Selain itu, penelitian di masa mendatang dapat diarahkan pada studi komparatif antar sekolah dengan latar belakang yang berbeda, guna mengetahui sejauh mana karakteristik sekolah memengaruhi pola implementasi kebijakan. Penelitian longitudinal juga dapat dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari Kurikulum Merdeka terhadap capaian belajar dan pembentukan karakter siswa secara lebih objektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan fokus kajian, serta data dan temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang selanjutnya diuraikan dalam bagian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi antar pelaksana kebijakan di SMPIT At-Taqwa Surabaya telah berjalan secara efektif dan terstruktur. Komunikasi dilakukan secara rutin melalui briefing pagi, rapat mingguan, media digital seperti WhatsApp, serta diskusi informal. Kepala sekolah, waka kurikulum, dan koordinator jenjang berperan aktif dalam menyampaikan informasi dan memastikan pemahaman yang merata. Komunikasi dua arah juga difasilitasi melalui sesi tanya jawab dan diskusi, sehingga guru merasa dilibatkan dan dipahami. Meskipun demikian, tantangan komunikasi masih ditemukan di tingkat siswa, khususnya dalam pelaksanaan proyek P5, yang memerlukan bimbingan lebih lanjut. SMPIT At-Taqwa Surabaya memiliki sumber daya yang memadai dalam mendukung implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka.
2. Sikap dan para guru terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka positif sehingga kebijakan ini terimplementasikan dengan baik. Guru merespons antusias dan menunjukkan keterbukaan terhadap pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Mereka merasa terbantu dengan dukungan kolaboratif antarguru, serta platform Merdeka Mengajar. Kebijakan Kurikulum Merdeka dinilai sesuai dengan karakteristik siswa dan mendorong pengembangan keterampilan abad 21. Hambatan yang muncul cenderung bersifat teknis dan dapat diatasi melalui evaluasi dan koordinasi internal secara berkala.
3. Sarana dan prasarana seperti LCD, laboratorium, komputer, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya telah tersedia dan dimanfaatkan secara optimal dalam kebijakan kurikulum merdeka. Selain itu, sekolah juga rutin mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru. Bahan ajar disusun secara mandiri oleh guru melalui kolaborasi internal agar sesuai dengan karakteristik siswa. Komitmen yayasan dan dukungan kepala sekolah turut memperkuat kesiapan sumber daya dalam menjalankan kebijakan ini secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Andy Hargreaves, & Michael Fullan. (2012). *Professional Capital Transforming Teaching In Every School*. Teacher Collage Colombia University. Www.Principal.Ca

- Bayu Kusumo, Henny Sutrisman, Rosmerriy Simanjuntak, Adrianus Prihartanto, Askrening Askrening, & Reny Yunus. (2024). The Impact Of Technology-Based Learning On Student Engagement And Achievement In The Digital Era. *International Journal Of Educational Evaluation And Policy Analysis*, 1(4), 41–53. <https://doi.org/10.62951/Ijeepa.V1i4.55>
- Christianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*.
- Dewi Fusvita. (2023). Pembentukan Kepribadian Muslim Perspektif Filsafat Pendidikan Islam Formation Of Muslim Personality In Islamic Educational Philosophy. *Liaison Academia And Society*, 2, 51–61. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/bcopj-las>
- Dewi, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak Upt Sdn 211 Gresik. *Jurnal Review Pendidikan Dasar*, 9(3). <http://journal.unesa.ac.id/index.php/pd>
- Fadhli, R. (2022). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 5(2), 147–156. <https://doi.org/10.31949/jee.V4i1.4230>
- Febryanti, M., Pandu Primadata Prodi Atau Jurusan Sosiologi, A., & Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, F. (2025). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Strategi Guru Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Di Sd “Nusa Bangsa” 1. 12(5), 1892–1906. <https://doi.org/10.31604/jips.V12i5.2025>
- Fenty Setiawati. (2022). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum. *Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum-Issn:2654-5849terhadap Pembelajaran Di Sekolahe-Issn: 2715-1042nizamul ‘Ilmi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (Jmpi)*, 07.
- Garay Abad, L., & Hattie, J. (2025). The Impact Of Teaching Materials On Instructional Design And Teacher Development. *Frontiers In Education*, 10. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1577721>
- Lestari, D., Asbari, M., & Yani, E. E. (2023). Kurikulum Merdeka: Hakikat Kurikulum Dalam Pendidikan. *Journal Of Information Systems And Management*, 02(05). <https://lipi.go.id/id/>
- Miles Matthew B., Huberman Michael, & Saldana A. Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis A Sourcebook* (H. Salmon, K. Kosciela, & L. Barrett, Eds.; 3rd Ed.). Sage Publication.
- Nasir, M., & Sutiah. (2025). *Pengintegrasian Teknologi Dalam Pembelajaran Di Era Digital (Sebuah Kajian Pustaka)*. [https://doi.org/10.21927/Literasi.2025.16\(1\).66-77](https://doi.org/10.21927/Literasi.2025.16(1).66-77)
- Nugroho, K. Y., Anwar, C., & Hartono, H. (2024). Social Constructivist Mentoring Program To Support Teacher Professional Development: An Action Research Approach. *Qualitative Report*, 29(5), 1416–1436. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2024.6634>
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy* (3rd Ed.). Pt. Elex Media Komputindo.
- Pratikno, Y., Hermawan, E., & Arifin, A. L. (2022). Human Resource ‘Kurikulum Merdeka’ From Design To Implementation In The School: What Worked And What Not In Indonesian Education. *Jurnal Iqra’ : Kajian Ilmu Pendidikan*, 7(1), 326–343. <https://doi.org/10.25217/ji.V7i1.1708>

- Pratiwi, Y., & Sutrisno, S. (2023). Policy Analysis Of School Principals In Preparing The Implementation Of The Independent Learning Curriculum In Elementary Schools (Ep 7: Driving School Program). *Eduhumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 15(2), 195–206. <https://doi.org/10.17509/Eh.V15i2.53714>
- Rahmawati A, Muh Isa Ansari, & Anwar Parawangi. (2020). 3681-12265-1-Pb. *Jurna Unismuh*, 1.
- Rahmawati, S., Astuti, D., & Fadriati, F. (2024). Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka. *Indo-Mathedu Intellectuals Journal*, 5(3), 3026–3038. <https://doi.org/10.54373/Imej.V5i3.1212>
- Ramadhan, I. (2024). Implementation Of Kurikulum Merdeka At Sma Negeri 1 Pontianak. *Jurnal Upi*, 21(2), 925–940. <https://doi.org/10.17509/Jik.V21i2.68857>
- Rosyad, A. M., & Zuchdi, D. (2018). Aktualisasi Pendidikan Karakter Berbasis Kultur Sekolah Dalam Pembelajaran Ips Di Smp. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan Ips*, 5(1), 79–92. <https://doi.org/10.21831/Hsji.V5i1.14925>
- Salamah, U., Listiyani, Y., & Mustafiyanti, M. (2024). Analisis Konsep Dan Struktur Kurikulum Merdeka Dan Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2, 123–129. <https://doi.org/10.55606/Khatulistiwa.V4i2.3234>
- Sholeh, M., Widodo, B. S., & Putra, B. A. W. (2024). Evaluating The Implementation Of The Independent Curriculum Policy In Indonesia: Sentiment Analysis Article Info Abstract. *Studies In Learning And Teaching*, 5(1). <https://doi.org/10.46627/Silet>
- Sohiron. (2015). *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan* (J. Kasdi & Design Mutiara, Eds.; 5th Ed., Vol. 5). Kreasi Edukasi Publishing And Consulting Compny. <https://www.researchgate.net/publication/338674851>
- Suprihatiningrum, Jamil. (2017). *Strategi Pembelajaran : Teori Dan Aplikasi*.
- Syam, R. (2017). Posisi Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran Dalam Pendidikan. *Muaddib*, 07.
- Syaodih, E., Hidayat, D., Halim, H., Gustini, L. K., & Krisbianto, S. (2022). Collaborative Adaptive Learning Model With A Communication Competency Approach During The Covid-19 Pandemic In Indonesia And Japan. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(4), 6469–6482. <https://doi.org/10.35445/Alishlah.V14i4.2661>
- Umar, U., Jayanti, M. I., Annafi, N., & Lukman, L. (2024). Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 7(1), 57–69. <https://doi.org/10.30605/Jsgp.7.1.2024.3386>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind In Society : The Development Of Higher Psychological Processes* (M. Cole, V. John Steiner, S. Scribner, & E. S. Souberman, Eds.). The President And Fellows Of Harvard College.
- Wahab Abdul. (2005). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo. (2021). *Kepemimpinan Kepala Sekolah (Tinjauan Teoretik & Permasalahannya)*. Rajawali Pers.

- Wijaya, C., & Hadijaya, Y. (2024). *Implementation Of The Independent Learning Curriculum Policy At Man 2 Langkat*. <https://jurnaldidaktika.org>
- Yansah, O., Asbari, M., Jamaludin, G. M., Marini, A., & Ms, Z. (2023). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar: Tantangan Dan Peluang. *Journal Of Information Systems And Management*, 02(05). <https://youtu.be/RovhjheboPo?si=Qjlbqhbymyilnt4m>
- Yatimah, D., Madhakomala, R., & Adman, E. S. (N.D.). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan* Penerbit Cv.Eureka Media Aksara (E. Hermawan, Ed.; 1st Ed.). Eureka Media Aksara.
- Zaky, H. (2023). Feedback Effectiveness In Higher Education: Utilizing Students' Feedback To Foster Teaching And Learning. *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4505733>